

**ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM
DAN KEGIATAN FASILITASI PUG
DI LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI
(SESI I)**

rasjid.69@gmail.com

ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN FASILITASI PUG DI LINGKUP PEMERINTAH PROVINSI JAMBI (4 JAMLAT)

TUJUAN PEMBELAJARAN	1.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SECARA BIOLOGIS DAN KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA
	2.	PESERTA MEMAHAMI KONSEP GENDER
	3.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI PERBEDAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
	4.	PESERTA MEMAHAMI ISU-ISU GENDER
	5.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI STRATEGI ISU GENDER DALAM KEBIJAKAN DAERAH MELALUI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN AFFIRMATIVE ACTION
	6.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI OPTIMALISASI PERAN KELOMPOK KERJA (POKJA)PUG

OUTPUT	PESERTA MAMPU MERUMUSKAN ISU STRATEGIS GENDER SESUAI DENGAN KEBIJAKAN DAERAH
---------------	---

POKOK BAHASAN 1	PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
1.1	PERBEDAAN BIOLOGIS PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
1.2	PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SEBAGAI HASIL KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA

1.1. PERBEDAAN BIOLOGIS PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

PEREMPUAN

CIRI PRIMER

- MEMILIKI VAGINA
- MEMILIKI OVARIUM (INDUNG TELUR)
- MEMPRODUKSI OVUM (SEL TELUR)
- MEMILIKI UTERUS
- MENGALAMI MENSTRUASI
- MEMILIKI KROMOSOM XX

CIRI SEKUNDER

- KULIT HALUS
- SUARA HALUS
- DADA BESAR
- DLL

LAKI-LAKI

CIRI PRIMER

- MEMILIKI PENIS
- MEMILIKI KANTUNG ZAKAR
- MEMILIKI BUAH ZAKAR
- MEMPRODUKSI SPERMA
- PROSTAT
- MEMILIKI KROMOSOM XY

CIRI SEKUNDER

- BULU DADA
- JAKUN
- SUARA BERAT
- BERKUMIS
- DLL

BERSIFAT KODRATI, TIDAK DAPAT BERUBAH, TIDAK DAPAT DITUKAR, BERLAKU SEPANJANG ZAMAN, CIPTAAN TUHAN

1.2. PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SEBAGAI HASIL KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA

PEREMPUAN		PERBEDAAN		LAKI-LAKI
SEKTOR DOMESTIK, MEMASAK, MENCUCI, MENYETRIKA	>	PERAN	<	SEKTOR PUBLIK, BEKERJA Mencari NAFKAH DI LUAR RUMAH
PENCARI NAFKAH TAMBAHAN	>	FUNGSI	<	PENCARI NAFKAH UTAMA
IBU RUMAH TANGGA	>	TANGGUNG JAWAB	<	KEPALA KELUARGA
PEMININ	>	SIKAP	<	MASKULIN
EMOSIONAL, RAGU- RAGU, PASIF, LEMAH	>	PERILAKU	<	RASIONAL, TEGAS, AGRESIF, KUAT

**DAPAT BERUBAH, DAPAT DITUKAR, BERGANTUNG WAKTU,
BUATAN MANUSIA, TIDAK BERSIFAT KODRATI**

POKOK BAHASAN 2	KONSEP GENDER
2.1	PENGERTIAN GENDER
2.2	TEORI GENDER
2.3	DASAR HUKUM

2. KONSEP GENDER

2.1. PENGERTIAN

PERBEDAAN-PERBEDAAN SIFAT, PERANAN, FUNGSI, DAN STATUS ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI YANG BUKAN BERDASARKAN PADA PERBEDAAN BIOLOGIS, TETAPI BERDASARKAN RELASI SOSIAL BUDAYA YANG DIPENGARUHI OLEH STRUKTUR MASYARAKAT YANG LEBIH LUAS. JADI, GENDER MERUPAKAN KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA DAN DAPAT BERUBAH SESUAI PERKEMBANGAN ZAMAN.

2.2. TEORI GENDER

TEORI NURTURE

- **PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI HAKEKATNYA HASIL KONSTRUKSI SOSIAL BUDAYA SEHINGGA MENGHASILKAN PERAN DAN TUGAS YANG BERBEDA**
- **PERBEDAAN MENYEBABKAN PEREMPUAN TERTINGGAL**
- **KONSTRUKSI SOSIAL MENGHASILKAN PERBEDAAN KELAS, LAKI-LAKI = BORJUIS, PEREMPUAN = PROLETAR**
- **PEREMPUAN DAPAT BERPERAN MELALUI PROGRAM KHUSUS (AFFIRMATIVE ACTION)**

2.2. TEORI GENDER

TEORI NATURE

- PERBEDAAN PEREMPUAN & LAKI-LAKI ADALAH KODRAT, SEHINGGA HARUS DITERIMA**
- PERBEDAAN BIOLOGIS MEMBERIKAN INDIKASI & IMPLIKASI PADA PERAN & TUGAS YANG BERBEDA**
- ALIRAN INI MELAHIRKAN PAHAM STRUKTURAL FUNGSIONAL YANG MENERIMA PERBEDAAN PERAN, ASAL DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS DAN DILANDASI OLEH KOMITMEN**

2.2. TEORI GENDER

TEORI EQUILIBRIUM

- KONSEP KEMITRAAN & KEHARMONISAN DALAM HUBUNGAN ANTARA PEREMPUAN & LAKI-LAKI**
- MEWUJUDKAN KONSEP INI, SETIAP KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN AGAR DIPERHITUNGGAN KEPENTINGAN & PERAN PEREMPUAN & LAKI-LAKI SECARA SEIMBANG**
- SETIAP PIHAK PUNYA KELEBIHAN SEKALIGUS KEKURANGAN, KEKUATAN SEKALIGUS KELEMAHAN YANG PERLU DIISI & DILENGKAPI PIHAK LAIN DALAM KERJASMA YANG SETARA**

2.3. DASAR HUKUM

- UUD 1945 PASAL PASAL 27 AYAT (1) DAN (2), SERTA BAB XI PASAL 28A, 28 B DAN 28C
- UU NO. 7 TAHUN 1984 TENTANG CEDAW
- INPRES NO. 9 TAHUN 2000 TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
- UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
- UU NOMOR 35 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
- PERMENDAGRI NO 67 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI DAERAH;
- SURAT EDARAN BERSAMA (SEB) 4 MENTERI: MENTERI PPN/KETUA BAPPENAS, MENKEU, MENDAGRI DAN MENTERI PPPA TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN PUG MELALUI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)

POKOK BAHASAN 3

**PERBEDAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN
DAN LAKI-LAKI**

3. PERBEDAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

PERBEDAAN BIOLOGIS DAN PERBEDAAN PERAN, FUNGSI, TANGGUANG JAWAB, SIKAP DAN PERILAKU ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI SEBAGAI KONSTRUKSI SOSIAL DAN BUDAYA MELAHIRKAN PERBEDAAN KEBUTUHAN DIANTARA KEDUANYA, YANG DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI KEBUTUHAN SPESIFIK, PRAKTIS DAN STRATEGIS DENGAN FOKUS PADA PEREMPUAN

KEBUTUHAN SPESIFIK

- PEREMPUAN PERLU LEBIH BANYAK ZAT BESI PADA SAAT MENSTRUASI, HAMIL DAN MELAHIRKAN
- PEREMPUAN PERLU PEMBALUT

KEBUTUHAN PRAKTIS

- TOILET PEREMPUAN
- RUANG LAKTASI
- BALAI PERSALINAN
- PENITIPAN ANAK
- RUANG GANTI PAKAIAN

KEBUTUHAN STRATEGIS

- PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI
- PENGHAPUSAN REGULASI YANG BIAS GENDER
- PENGUATAN PERAN PEREMPUAN MELALUI REGULASI RESPONSIF GENDER DAN AFFIRMATIVE ACTION

POKOK BAHASAN 4	ISU GENDER
4.1	CIRI ISU GENDER
4.2	CIRI ISU STRATEGIS GENDER

4. ISU GENDER

ISU GENDER ADALAH SUATU KONDISI YANG MENUNJUKKAN KESENJANGAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI ATAU KETIMPANGAN GENDER. KONDISI KETIMPANGAN INI DIPEROLEH DENGAN MEMBANDINGKAN KONDISI YANG DICITA-CITAKAN (KONDISI NORMATIF) DENGAN KONDISI GENDER SEBAGAIMANA ADANYA (KONDISI SUBYEKTIF)

4.1. CIRI ISU GENDER

- **MENYANGKUT RELASI/KONDISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **ADANYA KETIMPANGAN AKSES, MANFAAT, PARTISIPASI DAN KONTROL ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **ADANYA KETIDAKADILAN YANG DIALAMI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM BENTUK MARGINALISASI, SUB ORDINASI, STEREOTYPE, BEBAN KERJA MAUPUN KEKERASAN**
- **ADANYA UNSUR PENGARUH BUDAYA DAN KEBIJAKAN**

4.2. CIRI ISU STRATEGIS GENDER

- **ADANYA KETIDAKADILAN GENDER**
- **MENDESAK UNTUK SEGERA DISELESAIKAN**
- **PENYELESAIAN BERDAMPAK POSITIF PADA PADA ISU GENDER LAINNYA**
- **BERORIENTASI PADA PERUBAHAN SISTEMIK RELASI/KONDISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **ADANYA PENGARUH BUDAYA DAN KEBIJAKAN**

POKOK BAHASAN 5	INTEGRASI GENDER MELALUI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER MAUPUN AFFIRMATIVE ACTION
5.1	PENGERTIAN
5.2	MANFAAT PUG
5.3	INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 2000

5. INTEGRASI GENDER MELALUI STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER MAUPUN AFFIRMATIVE ACTION

PENGARUSUTAMAAN GENDER ADALAH STRATEGI YANG DIBANGUN UNTUK MENINTEGRASIKAN GENDER MENJADI SATU DIMENSI INTEGRAL DARI PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI ATAS KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN, YANG BERTUJUAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN Keadilan GENDER.

KESETARAAN GENDER BERMAKNAKESAMAAN KONDISI DAN POSISI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM MEMPEROLEH KESEMPATAN DAN HAK-HAKNYA UNTUK BERPERAN DAN BERPARTISIPASI DAN PEMBANGUNAN.

Keadilan GENDER BERMAKNA PERLAKUAN ADIL BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM KESELURUHAN PROSES KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN PENGALAMAN, KEBUTUHAN, KESULITAN DAN HAMBATAN SEBAGAI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

AFIIRMATIVE ACTION ADALAH PENGEMBANGAN PROGRAM KHUSUS (PEMBERDAYAAN PEREMPUAN) DALAM RANGKA MENINGKATKAN KESETARAAN GENDER DALAM BIDANG PEKERJAAN DAN PEMBANGUNAN

CONTOH PUG

- **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **PEMBANGUNAN PUSAT PERBELANJAAN SUDAH MEMPERHITUNGGAN RUANG PUBLIK UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SPESIFIK PEREMPUAN**

CONTOH AFFIRMATIVE ACTON

- **DIKLAT KEPEMIMPINAN BAGI PEREMPUAN YANG POTENSIAL MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL**
- **30 % KUOTA CALON LEGISLATIF PEREMPUAN**
- **1 ORANG PEREMPUAN ANGGOTA BPD**
- **30 % PEREMPUAN YANG HADIR DALAM MUSRENBANGDES**

5.2. MANFAAT PUG

- MEMPEROLEH AKSES YANG SAMA KEPADA SUMBERDAYA PEMBANGUNAN ;**
- BERPARTISIPASI YANG SAMA DALAM PROSES PEMBANGUNAN, TERMASUK PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN ;**
- MEMILIKI KONTROL YANG SAMA ATAS SUMBER DAYA PEMBANGUNAN; DAN**
- MEMPEROLEH MANFAAT YANG SAMA DARI HASIL PEMBANGUNAN;**

5.3. INSTRUKSI PRESIDEN 9/2000

KEPADA

- MENTERI;
- KEPALA LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN;
- PIMPINAN KESEKRETARIATAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA;
- PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA;
- KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA;
- JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA;
- GUBERNUR;
- BUPATI/WALIKOTA

***UNTUK MELAKSANAKAN STRATEGI PUG
DALAM PEMBANGUNAN***

POKOK BAHASAN 6	KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)
6.1	TUGAS DAN FUNGSI POKJA PUG
6.2	KOMPONEN AWAL PUG
6.3	IMPLEMENTASI PUG

6. KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

KELEMBAGAAN PUG DIBENTUK BERUPA KELOMPOK KERJA (POKJA) PUG YANG DIKETUI OLEH KEPALA BAPPEDA, MAUPUN FOCAL POINT PUG. POKJA PUG ADALAH WADAH KONSULTASI BAGI PELAKSANA DAN PENGGERAK PUG DARI BERBAGAI INSTANSI/LEMBAGA DI DAERAH. FOCAL POINT PUG ADALAH INDIVIDU-INDIVIDU YANG TELAH SENSISITIF GENDER YANG BERASAL DARI BERBAGAI INSTANSI/LEMBAGA DI DAERAH YANG MEMPU MELAKSANAAN PUG DALAM KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.

TUGAS POKJA PUG

- **MEMPROMOSIKAN DAN MEMFASILITASI PUG KEPADA SETIAP PERANGKAT DAERAH**
- **MELAKSANAKAN SOSIALISASI PUG KEPADA KAB/KOTA**
- **MENDORONG TERWUJUDNYA PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER**
- **MENYUSUN PROFIL GENDER**
- **MELAKUKAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PUG DI PERANGKAT DAERAH DAN KAB/KOTA**
- **MENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH PUG**

FUNGSI POKJA PUG

- **MENGIDENTIFIKASI DAN MENGAJAI ISU GENDER PADA BIDANG PEMBANGUNAN**
- **MENGEMBANGKAN KIE UNTUK PUG**
- **MENGEMBANGKAN MODEL PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER**
- **MELAKSANAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUG**
- **FASILITASI DAN ADVOKASI PROGRAM DAN KEGIATAN PUG**

6.2. KOMPONEN AWAL PUG

- 1. KOMITMEN;**
- 2. KEBIJAKAN DAN PROGRAM;**
- 3. KELEMBAGAAN PUG TERMASUK
UNIT-UNIT KERJA
STRUKTURAL/FUNGSIONAL**
- 4. SUMBER DAYA MANUSIA,
PENDANAAN DAN PRASARAN YANG
MEMADAI**
- 5. KETERSEDIAAN DATA TERPILAH
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**
- 6. INSTRUMEN ANALISIS GENDER.**
- 7. DUKUNGAN MASYARAKAT (CIVIL
SOCIETY)**

6.3. IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER (PERPRES 9/2000)

NO	KOMPONEN	KELUARAN	ALAT	KEGIATAN
1	KOMITMEN	1. PERDA 2. PERGUB 3. KEPGUB	1. NASKAH AKADEMIS 2. PROLEGDA 3. PEDOMAN	1. PENYUSUNAN NA 2. WORKSHOP 3. SOSIALISASI
2	KEBIJAKAN	1. PPRG 2. ARG	1. PEDOMAN PPRG 2. PEDOMAN ARG	1. DIKLAT 2. TOT 3. ADVOKASI
3	KELEMBAGAAN	1. POKJA PUG 2. FOCAL POINT 3. UNIT OPD	PEDOMAN PUG	1. BIMTEK 2. ADVOKASI
4.	SUMBER DAYA	1. PERSONIL 2. DANA & FASILITAS	MODUL DIKLAT/BIMTEK	1. DIKLAT/BIMTEK 2. TOT 3. ADVOKASI
5.	DATA DAN SISTEM INFORMASI	1. BUKU STATISTIK YANG TERPILAH 2. TERSEDIAANYA SIM	1. PEDOMAN PENYUSUNAN STATISTIK GENDER 2. PEDOMAN DATA TERPILAH	1. FGD 2. KAJIAN 3. WORKSHOP 4. DISEMINASI
6.	INSTRUMEN/TOOL	1. ALAT ANALYSIS	PANDUAN, MODUL DLL	1. FGD 2. KAJIAN 3. WORKSHOP 4. DISEMINASI
6.	CIVIL SOCIETY	1. JEJARING 2. PENGAWASAN 3. PEMBINAAN	PEDOMAN PARTISIPASI MASYARAKAT	1. FGD 2. KAJIAN 3. WORKSHOP 4. SOSIALISASI

PENGARUSUTAMAAN GENDER

- Istilah Pengarusutamaan Gender (*gender mainstreaming*) tercantum dalam Beijing Platform of Action pada tahun 1995 dengan pengertian sebagai berikut:

Berdasarkan Inpres RI No. 9 Tahun 2000, yang dimaksud dengan PUG adalah **strategi** yang dibangun untuk mengintegrasikan Gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

PUG ditujukan untuk mencapai **kesetaraan dan keadilan** Gender yang merupakan upaya untuk menegakkan hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat

Kualitas SDM tercermin dari indikator:

- **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

→ Indeks komposit yang mengukur kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf), dan ekonomi (Produk Domestik Bruto/PDB per kapita yang dihitung berdasarkan paritas daya beli).

- **Indeks Pembangunan Gender (IPG)**

→ IPM yang sudah dikoreksi dengan tingkat disparitas gendernya. Menggambarkan kesenjangan/gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan.

→ Indikator IPG :

- Umur Harapan Hidup
- Harapan Lama Sekolah
- Rata-rata lama sekolah
- Pengeluaran perkapita disesuaikan

• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

→ Indeks komposit yang dihitung berdasarkan partisipasi perempuan di parlemen, perempuan dalam angkatan kerja, perempuan pekerja profesional, pejabat tinggi, dan manajer, serta upah pekerja perempuan di sektor non-pertanian.

→ Indikator IDG :

- Keterlibatan Perempuan di Parlemen
- Perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi
- Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja

PREVELENSI IPM, IPG DAN IDG 2016 - 2017

	IPM 2016-2017	IPG 2016-2017	IDG 2016-2017
NASIONAL	70,18 --- 70,81	90,82 --- 90,96	71,39 ---71,74
PROVINSI JAMBI	69,62 --- 69,99	88,29 --- 88,13	63,14 --- 65,32

*Sumber ; Pembangunan Manusia Berbasis Gender KPPA RI,
2018*

Kebijakan/Regulasi yang telah dikeluarkan terkait Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Jambi

▶ Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi

No	Regulasi Gender
1	Peraturan Gubernur No.19 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Jambi
2	Keputusan Gubernur No. 644 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pokja PUG
3	Keputusan Gubernur No. 492 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengarusutamaan Gender.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DP3AP2 PROVINSI JAMBI

ARAH KEBIJAKAN:

Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan hak perempuan dan anak

STRATEGI:

- 1. Meningkatkan pemahaman Pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan Pokja PUG dan Forum RKPD Kab/Kota secara berkala ;**
- 2. Memperkuat jejaring mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya dengan dilaksanakan temu PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak);**
- 3. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah melalui pengesahan PERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

(lanjutan)

STRATEGI:

- 4. Meningkatkan kualitas lembaga layanan (P2TP2A) melalui perubahan P2TP2A menjadi UPTD PPA / TA 2019 yang didalamnya mencakup SDM yang melayani perempuan dan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. ;**
- 5. Memperkuat sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI (Sistem Informasi Online) PPA;**
- 6. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;**
- 7. Meningkatkan kapabilitas dan partisipasi perempuan calon anggota legislatif dan calon kepala daerah melalui Pembinaan Organisasi Perempuan;**

**PROGRAM DAN KEGIATAN
BERBASIS ANGGARAN
RESPONSIF GENDER (ARG)
LINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI JAMBI**

PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT PEREMPUAN DAN ANAK
Sumber Dana : APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

No	SKPD	Program/Kegiatan
1.	BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none">1. Kegiatan Kursus, Pelatihan , Sosialisasi dan Bimbingan Teknis.2. Pelayanan Publikasi Pembangunan3. Pengembangan Data dan Informasi serta tersedianya Sistem Data Terpadu4. Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan5. Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya6. Perencanaan dan Koordinasi Bidang SDM dan Kependudukan

No	SKPD	Program/Kegiatan
2.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	<ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan Anak (P2TP2A)2. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak3. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak4. Sosialisasi Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Lingkungan5. Pembinaan dan Pengembangan Kota Layak Anak6. Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) tentang Perlindungan Anak7. Sosialisasi Pendidikan Politik Perempuan8. Pelatihan (TOT) bagi SDM Pelayanan dan Pendampingan Kotban KDRT9. Pembinaan dan Revitalisasi Pokjanel Posyandu10. Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga11. Pembinaan Organisasi Perempuan12. Perlindungan Perempuan terhadap tindak kekerasan13. Pembinaan dan Penilaian P2WKSS14. Pelatihan Perempuan di Pedesaan dalam bidang usaha Ekonomi Produktif

No	SKPD	Program/Kegiatan
3.	INSPEKTORAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala 2. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 3. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
4.	BADAN KEUANGAN DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan pemeliharaan Sistem Keuangan Daerah 2. Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Retribusi Daerah 3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Bakeuda Provinsi Jambi

No	SKPD	Program/Kegiatan
4.	Dinas Kesehatan	<p>Program Pengawasan Obat dan Makanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan lomba sekolah sehat (LSS) tingkat nasional (pembinaan sarana makanan jajanan anak sekolah yang mengikuti LSS tingkat nasional). 2. Lomba sekolah sehat (LSS) tingkat provinsi (penilaian sarana makanan jajanan sekolah yang mengikuti LSS nasional). <p>Program kesehatan anak balita</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita <p>Program kesehatan ibu dan anak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Kesehatan Anak usia Sekolah dan remaja 2. Kegiatan Perawatan berkala bagi ibu Hamil dari keluarga kurang mampu <p>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap <p>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian makanan tambahan dan vitamin 2. Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi <p>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyehatan air dan sanitasi dasar

No	SKPD	Program/Kegiatan
5.	Dinas Pendidikan	<p>Program Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Peningkatan Mutu Sarana Prasarana PKLK 2. Penyelenggaraan Event-Event Tingkat Provinsi/Nasional 3. Kegiatan Penyelenggaraan PLA 4. Kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) <p>Program Pembinaan SMA</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pengadaan Peralatan SMA 2. Pembinaan Olimpiade Sain Nasional 3. Kegiatan Pengadaan Meubiler SMA 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) 5. Pelatihan Kompetensi Guru Jenjang SMA/SMK <p>Program Pembinaan SMK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 2. Kegiatan Kompetensi Siswa SMK 3. Kegiatan Pembinaan Lomba Siswa Tingkat Nasional 4. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMK

No	SKPD	Program/Kegiatan
6.	Dinas Sosdukcapil	<p>Program Pembinaan, Pemberdayaan, Rehabilitasi, Bantuan Perlindungan dan Jaminan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Paraktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar 2. Kegiatan Pembinaan Anak Terlantar di Luar Panti dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus <p>Program Pembinaan Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Eks. Napi, Tuna Sosial, PSK, Narkoba) (Dinas Sosdukcapil)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha Bagi Wanita Penyandang PMKS. 2. Kegiatan Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) bagi Fakir Miskin Pesisir dan Perbatasan

No	SKPD	Program/Kegiatan
7.	Dinas Pekerjaan Umum dan PR	<p>Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan Penyediaan, Pengelolaan air minum dan destribusi jaringan air bersih. 2. Kegiatan Penyediaan sarana dan Prasarana Sanitasi 3. Kegiatan Penyusunan Program Rencana Umum dan Strategis Bidang Infrastruktur 4. Kegiatan pembinaan aparatur SDM 5. Kegiatan Operasi dan pemeliharaan Prasarana Penegendalian Banjir 6. Kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air

No	SKPD	Program/Kegiatan
8.	Biro Kesramas	<p>Program Fasilitasi Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Kepemudaan</p> <p>1. Kegiatan Koordinasi Pembinaan Perempuan</p>
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	<p>1. Kegiatan Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan Wanita Pembudidaya Ikan dan Pemuda Kreatif .</p>
10.	Biro Pemerintahan	<p>1. Fasilitasi Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan penanganan Masalah Trantib</p> <p>2. Pembinaan dan pembantuan nama rupabumi dan pemetaan wilayah</p> <p>3. Koordinasi dan pelayanan urusan KDH/WKDH,DPR,DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan Hubungan Antar Lembaga</p>

No	SKPD	Program/Kegiatan
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Kelembagaan Industri Kecil 2. Pengembangan dan Kewirausahaan Baru 3. Pengembangan pengrajin Unit Promosi Jambi 4. Pengembangan Rumah Tenun Jambi 5. Pengembangan dan Kewirausahaan baru IKM 6. Peningkatan Pembinaan Usaha Industri 7. Bimbingan Teknis Pengelolaan Limbah Industri 8. Pelatihan Kewirausahaan IKM Potensial 9. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Industri Berbasis Teknologi 10. Pelatihan Eksport bagi IKM dan UMKM 11. Pengembangan Desain Kerajinan Berbasis Budaya Daerah

PROGRAM/KEGIATAN TERKAIT ANAK
Sumber Dana : APBD PROVINSI JAMBI TAHUN 2018

No	SKPD	Program/Kegiatan
12.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	1. Pengembangan Kelembagaan Sentra Produksi Pemasaran Iptek Provinsi Jambi
13.	Biro Organisasi	1. Kursus, Diklat, Pelatihan dan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis
14.	Badan Kepegawaian Daerah	1. Seleksi Pejabat Administrasi 2. Seleksi Calon Praja IPDN

No	SKPD	Program/Kegiatan
15.	Dinas Kehutanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam rehabilitasi Hutan dan lahan. 2. Penyuluhan Kesadaran masyarakat mengenai dampak kerusakan hutan
16.	Dinas KOMINFO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberdayaan TIK
17.	KESBANGPOL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Forum Discuss Politik

No	SKPD	Program/Kegiatan
18.	Dinas Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Penanganan Kerawanan Pangan Daerah2. Pengembangan Cadangan Pangan3. Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok4. Pengembangan Distribusi Pangan5. Peningkatan Ketersediaan Pangan6. Pengawasan Keamanan Pangan Asal Tumbuhan7. Percepatan Diversifikasi Konsumsi Pangan Berbahan Baku Sumber Daya Lokal
19.	Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi	<ol style="list-style-type: none">1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja berbasis kompetensi2. Pelatihan Kewirausahaan Produktif3. Pelatihan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja4. Pemagangan Dalam dan Luar Negeri5. Pendidikan dan Pelatihan dengan Bahasa Asing bagi calon tenaga kerja magang keluar negeri6. Sertifikasi kompetensi bagi instruktur, tenaga kerja dan perusahaan non konstruksi7. Kegiatan pameran bursa kerja8. Penyuluhan penempatan Calon TKI9. Kegiatan Pengembangan masyarakat melalui penerapan TTG

No	SKPD	Program/Kegiatan
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ol style="list-style-type: none">1. Rakor Program Kepemudaan dan Keolahragaan2. Pengembangan dan Peningkatan SDM Pelaku Olahraga3. Pelatihan Kewirausahaan bagi Pemuda4. Bulan Bhakti Pemuda5. Peningkatan Kesetiakawanan Sosial
21.	Dinas Lingkungan Hidup	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup2. Pemantauan Kualitas Lingkungan3. Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan4. Sosialisasi Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan
22.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUUan2. Pengembangan Koleksi Deposit, Pengadaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan
23.	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Tenaga Kendali Keamanan dan kenyamanan Lingkungan2. Pembentukan satuan keamanan lingkungan dan masyarakat3. Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan4. Pembinaan Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

No	SKPD	Program/Kegiatan
24.	Rumah Sakit Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 2. Pemeliharaan dan pemulihan Kesehatan 3. Pembangunan RS
25.	Dinas Koperasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Pengelolaan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil 2. Pemberdayaan dan pengembangan KSP/USP Koperasi
26.	RSU Raden Mattaher	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kursus, Pelatihan dan Sosialisasi Bimbingan Teknis 2. Pembangunan RS 3. Pengadaan Alat-alat kesehatan RS 4. Pengelolaan Program JAmkesda
27.	Sekretariat DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya 2. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 3. Kursus, Pelatihan dan Bimbingan Teknis 4. Pembahasan Rancangan PERDA
28	Biro Pengelolaan Barang Milik Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan dan Pemberdayaan SDM

No	SKPD	Program/Kegiatan
29.	Dinas Perkebunan	1. Intensifikasi Karet Rakyat
30.	BPBD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan Pra Bencana (Pengaktifan Posko Penanggulangan Bencana dan Sekolah Siaga bencana) 2. Penanggulangan saat bencana (ketersediaan pengadaan logistik dan peralatan) 3. Penanggulangan Pasca Bencana
31.	Biro Perekonomian dan SDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitasi dan Koordinasi Keikutsertaan Pemprov Jambi dalam even promosi potensi daerah dan produk unggulan dalam pengembangan ekonomi kreatif. 2. Koordinasi dan pembinaan program CSR perusahaan pengelola SDA di Provinsi Jambi

METODE DAN ANALISIS ARG DAN PPRG

TUJUAN PEMBELAJARAN	1.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI KONSEP PERENCANAAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
	2.	PESERTA MEMAHAMI TUJUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
	3.	PESERTA DAPAT MEMAHAMI KATEGORI ANGGARAN RESPONSIF GENDER
	4.	PESERTA MEMAHAMI TENTANG ANALISIS GENDER MODEL GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OUTPUT	PESERTA MAMPU MENYEBUTKAN PENGERTIAN DAN TUJUAN GAP
---------------	--

POKOK BAHASAN 1	KONSEP PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
1.1	PENGERTIAN
1.2	CONTOH PPRG

1.1. PENGERTIAN PPRG

PPRG MERUPAKAN SERANGKAIAN CARA DAN PENDEKATAN UNTUK MENGINTEGRASIKAN PERSPEKTIF GENDER DI DALAM PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN. PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER ADALAH PERENCANAAN UNTUK MENCAPAI KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER, YANG DILAKUKAN MELALUI PENGINTEGRASIAN PENGALAMAN, ASPIRASI, KEBUTUHAN, POTENSI DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

- PPRG DILAKUKAN DENGAN MEMASUKKAN PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN**
- PPRG DILAKUKAN BERDASARKAN DATA TERPILAH**
- PPRG MEMPERTAJAM TARGET GROUP (FOKUS PEREMPUAN)**
- PPRG BUKAN BERUPA PENAMBAHAN PROGRAM ATAU PEMBENTUKAN PROGRAM BARU DENGAN BIAYA TAMBAHAN**
- PPRG MENGARAHKAN SEMUA SEKTOR PERPERAN DALAM MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER**

1.2 . CONTOH PPRG

ANALISIS GENDER

- PEREMPUAN PERLU LEBIH BANYAK ZAT BESI PADA SAAT MENSTRUASI, HAMIL DAN MELAHIRKAN

ANALISIS KEBUTUHAN PEREMPUAN

- TOILET PEREMPUAN
- RUANG LAKTASI
- BALAI PERSALINAN
- PENYEDIAAN PEMBALUT
- RUANG GANTI PAKAIAN

PPRG

- FASILITASI PENYEDIAAN PIL ANTI NYERI HAID DI SEKOLAH, TEMPAT KERJA DLL
- FASILITASI PENYEDIAAN TOILET KHUSUS PEREMPUAN
- PENUGASAN LAIN KEPADA PEREMPUAN SELAMA MEREKA HAID, HAMIL ATAU PASCA-MELAHIRKAN

POKOK BAHASAN 2	TUJUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER (PPRG)
2.1	PENGERTIAN

2.1. TUJUAN PPRG

- **MENINGKATKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA PENGAMBIL KEPUTUSAN TENTANG PENTINGNYA ISU GENDER DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN PENTINGNYA UPAYA UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER**
- **MEMASTIKAN BAHWA ALOKASI PEMBANGUNAN MENJAMIN ADANYA MANFAAT YANG ADIL BAGI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI**
- **MEMBANGUN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ANGGARAN PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN KESETARAAN**
- **MENGURANGI KESENJANGAN GENDER DAN DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM PEMBANGUNAN**
- **MENINGKATKAN PARTISIPASI BAIK PEREMPUAN MAUPUN LAKI-LAKI DALAM SEMUA PROSES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**
- **MENJAMIN SEMUA KEBUTUHAN DAN ASPIRASI PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM BELANJA PEMBANGUNAN**

POKOK BAHASAN 3	KATAGORI ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
3.1	PENGERTIAN
3.2	PERBEDAAN MASING-MASING KATAGORI ARG

3.1. KATAGORI ARG

ANGGARAN KHUSUS TARGET GENDER (ATAU ANGGARAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SPESIFIK MENURUT JENIS KELAMIN)

ALOKASI ANGGARAN YANG DIPERUNTUKKAN GUNA MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR KHUSUS PEREMPUAN ATAU KEBUTUHAN DASAR KHUSUS LAKI-LAKI BERDASARKAN HASIL ANALISIS GENDER

CONTOH : PENYEDIAAN ALAT KB KHUSUS PEREMPUAN ATAU LAKI-LAKI

ANGGARAN PELEMBAGAAN KESETARAAN GENDER (ATAU ANGGARAN UNTUK AFIRMATIVE ACTION/TINDAKAN AFIRMASI)

ALOKASI ANGGARAN UNTUK PENGUATAN PELEMBAGAAN PUG, BAIK DALAM HAL PENDATAAN MAUPUN PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA.

CONTOH : ANGGARAN UNTUK PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN

ANGGARAN KESETARAAN GENDER (ATAU PENGELUARAN SECARA UMUM)

ALOKASI ANGGARAN UNTUK MENGATASI MASALAH KESENJANGAN GENDER DALAM BERBAGAI BIDANG PEMBANGUNAN TERMASUK DIANTARANYA KESENJANGAN PADA AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT TERHADAP SUMBERDAYA PEMBANGUNAN.

CONTOH : PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN

3.2. PERBEDAAN KATAGORI ARG

ANGGARAN KHUSUS TARGET GENDER (ATAU ANGGARAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN SPESIFIK MENURUT JENIS KELAMIN)
PEMENUHAN KEBUTUHAN SPESIFIK PEREMPUAN ATAU LAKI-LAKI
ANGGARAN PELEMBAGAAN KESETARAAN GENDER (ATAU ANGGARAN UNTUK AFIRMATIVE ACTION/TINDAKAN AFIRMASI)
1. MENINGKATKAN INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER 2. MEMPERKUAT PELEMBAGAAN PUG DALAM PEMBANGUNAN
ANGGARAN KESETARAAN GENDER (ATAU PENGELUARAN SECARA UMUM)
MENGURANGI KESENJANGAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

POKOK BAHASAN 4	ANALISIS ARG DAN PPRG
4.1	PENGERTIAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)
4.2	TUJUAN GAP
4.3	LANGKAH-LANGKAH GAP
4.4	FORMAT GAP

4.1. PENGERTIAN GAP

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) ADALAH SUATU ALAT ANALISIS GENDER YANG DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MEMBANTU PARA PERENCANA DALAM MELAKUKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PERENCANAAN KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN. DENGAN MENGGUNAKAN GAP, PARA PERENCANA KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN DAPAT MENGIDENTIFIKASI KESENJANGAN GENDER (GENDER GAP) DAN PERMASALAHAN GENDER (GENDER ISSUES) SERTA SEKALIGUS MENYUSUN RENCANA KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN YANG DITUJUKAN UNTUK MEMPERKECIL ATAU MENGHAPUS KESENJANGAN GENDER TERSEBUT

4.2. TUJUAN GAP

- MEMBANTU PERENCANA DALAM MENYUSUN PERENCANAAN YANG RESPONSIF GENDER**
- MENGIDENTIFIKASI KESENJANGAN GENDER BERDASARKAN AKSES, MANFAAT, PARTISIPASI, DAN KONTROL YANG DIPEROLEH PEREMPUAN ATAU LAKI-LAKI**
- MENGETAHUI LATAR BELAKANG TERJADINYA KESENJANGAN GENDER**
- MERUMUSKAN PERMASALAHAN SEBAGAI AKIBAT TERJADINYA KESENJANGAN GENDER**
- MENGINDETIFIKASI LANGKAH-LANGKAH/TINDAKAN INTERVENSI YANG DIPERLUKAN**

4.3. LANGKAH-LANGKAH GAP

LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
I. TAHAP ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER	
1. PILIH KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN YANG AKAN DIANALISIS	<ul style="list-style-type: none">• MEMILIH KEBIJAKAN / PROGRAM / KEGIATAN YANG DIANALISIS• MENULISKAN TUJUAN KEBIJAKAN TERSEBUT
2. MENYAJIKAN DATA PEMBUKA WAWASAN	MENYAJIKAN DATA TERPILAH BERUPA DATA STATISTIK, HASIL PENGAMATAN SURVEI DLL
3. MENGENALI FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KESENJANGAN	MENEMUKENALI DAN MENGETAHUI ADA TIDAKNYA FAKTOR KESENJANGAN GENDER DARI SEGI AKSES, PARTISIPASI, KONTROL DAN MANFAAT
4. MENEMUKENALI SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	TEMU KENALI ISU GENDER DI INTERNAL LEMBAGA, MISALNYA PRODUK HUKUM, KEBIJAKAN DAN PEMAHAMAN YANG MASIH KURANG BERKAITAN DENGAN PEMBANGUNAN GENDER DI INTERNAL LEMBAGA
5. MENEMUKENALI SEBAB KESENJANGAN EKSTERNAL	TEMU KENALI ISU GENDER DI EKSTERNAL LEMBAGA, MISALNYA FAKTOR BUDAYA, STEROTYPE TERHADAP PEREMPUAN DLL

4.3. LANGKAH-LANGKAH GAP

LANGKAH-LANGKAH	PENJELASAN
II. TAHAP FORMULASI KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER	
6. REFORMULASI TUJUAN	MERUMUSKAN KEMBALI TUJUAN KEBIJAKAN/PROGRAM/KEGIATAN YANG RESPONSIF GENDER
7. RENCANA AKSI	<ul style="list-style-type: none">• MENETAPKAN RENCANA AKSI• RENCANA AKSI DIHARAPKAN DAPAT MENGATASI KENEJANGAN YANG TERJADI PADA KOLOM 3,4 DAN 5
III. TAHAP PENGUKURAN HASIL	
8. DATA DASAR (BASE LINE)	<ul style="list-style-type: none">• MENETAPKAN DATA DASAR UNTUK MENGUKUR KEMAJUAN• DATA DIAMBIL DARI DATA PEMBUKA WAWASAN PADA KOLOM 2
9. INDIKATOR GENDER	MENETAPKAN INDIKATOR GENDER SEBAGAI PENGUKURAN HASIL MELALUI UKURAN KUANTITATIF MAUPUN KUALITATIF

4.4. FORMAT GAP

KOLOM 1	SKPD			
	PROGRAM	PILIH PROGRAM		
	KEGIATAN	PILIH KEGIATAN YANG REVELAN DENGAN PROGRAM YANG AKAN DIJALANKAN		
	INDIKATOR KINERJA	ISIKAN DATA KUANTITATIF DAN KUALITATIF UNTUK MENUNJUKAN ADANYA INDIKATOR KETERCAPAIAN PROGRAM		
	TUJUAN	TULISKAN TUJUAN SESUATI DENGAN DOKUMEN YANG ADA		
KOLOM 2	DATA PEMBUKA WAWASAN	AKSES DATA PELUANG MEMANFAATKAN SUMBER DAYA		
		PARTISIPASI DATA YANG MENUNJUKAN KNOWLEDGE, ATTITUDE DAN PRACTICE DALAM KEGIATAN YANG SUDAH DIPILIH DI KOLOM 1		
		KONTROL DATA TENTANG KEMAMPUAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN		
		MANFAAT ISIKAN MANFAAT DARI KEGIATAN YANG DIRASAKAN OLEH PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI		
KOLOM 3	ISU GENDER	FAKTOR KESENJANGAN	AKSES PARTISIPASI KONTROL MANFAAT	RUMUSKAN ISU GENDER SESUAI DENGAN YANG SUDAH DITUANGKAN PADA KOLOM 2
KOLOM 4		SEBAB KESENJANGAN INTERNAL	ISIKAN SEBAB KESENJANGAN DARI INTERNAL LEMBAGA, SEPERTI SDM, REGULASI, KOORDINASI DAN SARPRAS	
KOLOM 5		SEBAB KESENJANGAN EKTERNAL	ISIKAN SEBAB KESENJANGAN DARI EKSTERNAL LEMBAGA, SEPERTI NORMA, BUDAYA DAN LAIN-LAIN	

4.4. FORMAT GAP

KOLOM 6	REFORMULASI TUJUAN	FORMULASIKAN KEMBALI TUJUAN PADA KOLOT 1 APABILA HARUS DIREFORMULASI	
KOLOM 7	RENCANA AKSI	TUANGKAN RINCIAN KEGIATAN DENGAN AKTIFITAS-AKTIFITAS YANG RELEVAN UNTUK MENJAWAB PERMASALAHAN DAN ISU GENDER YANG TERDAPAT PADA KOLOM 3, 4, DAN 5	
KOLOM 8	PENGUKURAN HASIL	DATA DASAR (BASE LINE)	ISIKAN DATA SESUAI DENGAN KOLOM 2 TERUTAMA YANG MENUNJUKKAN KESENJANGAN GENDER
KOLOM 9		OUTPUT	<p><u>RUMUSAN KINERJA</u> SEBUTKAN RUMUSAN PELAYANAN / HASIL KEGIATAN YANG DITERIMA KELOMPOK SASARAN SESUI DENGAN TUJUAN KEGIATAN.</p> <p><u>INDIKATOR KINERJA</u> ISIKAN DATA KUANTITATIF ATAU KUALITATIF UNTUK MENUNJUKAN ADANYAKETERCAPAIAN TUJUAN</p>
		OUTCOME	<p><u>RUMUSAN KINERJA</u> SEBUTKAN PERUBAHAN KONDISI FISIK MAUPUN SOSIAL SEBAGAI AKIBAT DARI OUTPUN KEGIATAN. PASTIKAN RUMUSAN KINERJA MENJAWAB TUJUANH PROGRAM.</p> <p><u>INDIKATOR KINERJA</u> ISIKAN DATA KUANTITATIF ATAU KUALITATIF UNTUK MENUNJUKAN ADANYAKETERCAPAIAN TUJUAN</p>

**LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN
MEMANG BEDA,
NAMUN TIDAK BOLEH
DIBEDA-BEDAKAN**

TERIMA

KASIH